Pleeidoi

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

No. 02 / II/1995

Resolusi

MAHASISWA DAN GERAKAN KEBINGUNGAN

Keterjebakan mahasiswa dengan mentakdirkan dirinya sebagai " agent of change" masih terus bergema. Identifikasi ini terus membebani gerakan mahasiswa pasca NKK/BKK. Setelah sekian tahun tertidur, gerakan mahasiswa kembali menampakkan kekuatannya dalam konstelasi politik Indonesia. Setidaknya seperti di negara negara berkembang lainnya, mahasiswa memiliki peran dalam proses perubahan sosial. Gerakan mahasiswa disini harus dipahami sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih besar.

Konsep "back to campus" dan "man of analysis" yang diplotkan oleh pemerintah telah memisahkan mahasiswa dari komunitas besarnya. Secara tak sadar mahasiswa yang bangga dengan statusnya telah membuat jarak dengan masyarakat. Bak tinggal di menara gading, mahasiswa sudah apatis dengan masalah masalah masyarakat secara mendasar. Mereka terlalu percaya diri bahwa sebagai insan terdidik mereka mampu melakukan perubahan dengan sendirinya.

Ketika mereka terus gagal melakukan perubahan mulailah mereka mencari kambing hitam kepada sistem yang diplotkan oleh penguasa, tanpa disadari mereka telah masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh rezim. Seharusnya mereka mampu menyiasati pola tersebut dan terus berjuang.

Menjadi pertanyaan besar, sadarkah mahasiswa terhadap semua ini ? Sadarkah mahasiswa bahwa sebagai warga negara memiliki hak hak politik ? Ia bebas menyuarakan aspirasi politiknya melalui wadah yang ia yakini. Sebagai bagian civitas akademika mahasiswa memiliki hak hak tertentu seperti pendidikan yang murah, dosen berkualitas, keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. Jawaban pertanyaan itu tentunya ada di tangan kita semua, tinggal bagaimana kita menjawabnya. Tidak usah jauh jauh, untuk fakultas kita saja dulu. Empowering of the student; pemberdayaan mahasiswa !. (P)

MAHASISWA FH UGM

Apabila kita masih percaya pada mahasiswa sebagai komponen sebuah gerakan perubahan dalam wacana global tentu ia adalah komponen efektif dalam sebuah bangunan struktur kelas menengah. Maka kalau memang demikian adanya dalam wacana yang lebih sempit tentu ia merupakan aktor- aktor yang memaninkan peranan dengan kapasitas "bintang empat atau lima dalam panggung yang paling dekat dengannya, seperti lingkungan universitas dan fakultasnya sendiri.

Lebih jauh narasi di atas essensinya dapat diukur dan dibuktikan dalam pola aktivitas yang dilakoni mahasiswa, juga semangat serta sikap yang membelakangi pola tersebut.

Apalagi bagi sebuah aktivitas yang mengatasnamakan kata keramat : DEMOKRASI.

Dari sinilah pemahaman terhadap sebuah hajatan massal Pemilu mahasiswa FH UGM kemarin dapat kita simpulkan. Apakah mahasiswa FH UGM masih takut dan gamang akan independensi dan keotonomian ?

SK SAKTI REKTOR UGM

Begitulah ketika pengarang Indonesia ternama mengatakan, "Sekali dalam hidup orang harus menentukan sikap, kalau tidak ia tidak akan jadi apa-apa !" Barangkali inilah yang dijadikan acuan oleh aktivis SM dan BEM FH UGM periode lalu ketika menetapkan,"Pemilu mahasiswa FH UGM adalah emilu otonom.

Sikap ini merupakan rangkaian dan kepanjangan dari konflik kongres SMPT lalu dimana SM FH UGM menolak mengakui keabsahan kongres tersebut. "SM FH tidak meyakini SMPT sebagai lembaga konstitusional sehingga secara yuridis SMPT cacat hukum, berarti alasan logisnya SMFH tidak perlu ikut aturan main SMPT," Demikian jhonson salah seorang senator SMFH (periode lalu) menjelaskan.

Sikap ini kemudian tidak hanya berlaku di FH, juga pada 3 fakultas lain yaitu Sospol, KG dan KH. Jadi dengan demikian hajatan massal

Pemilu mahasiswa UGM yang dilakoni SMPT, 4 fakultas menyatakan diri otonom. Pemilu SMPT telah ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 1 Mei 1995 sedangkan 4 fakultas tadi tanggal pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dikalangan mereka sendiri.

Memangnya Rektor yang memiliki UGM ?" Sinis seorang mahasiswa Sospol. Betapa retorika-retorika politik yang mengelabui rakyat dilingkup elit atas negara ternyata telah meruyak pula pada lingkup kecil dibawahnya

Layaknya sebuah hajat, Pemilu SMPT pun marak mencari perhatian dan menyibukkan panitianya. Poster-poster ditempel, spanduk digelar, slogan-slogan ditampilkan. Tampak sekali berusaha keras memancing pasar. Sedangkan 4 fakultas tadi keadaan tampak adem ayem saja dan tak peduli dengan "Pesta Pusat". Tapi ternyata keadem-ayeman di ke- empat fakultas tadi terusik. Ini akibat munculnya SK sakti dari Rektor UGM. SK sakti tersebut ditujukan pada para birokrat fakultas dengan pengemban amanat PD III. SK sakti tersebut memberi petunjuk pada PD III untuk mengawasi (baca: merepresi) pelaksanaan Pemilu mahasiswa di fakultas masing-masing. Dalam SK sakti tersebut berisi pula amanah kepada PD III (Sebagai ketua panitia pelaksana Pemilu mahasiswa versi SMPT) untuk tetap menjalankan Pemilu di 4 fakultas tadi pada tanggal 1 Mei mengikuti tanggal pestanya SMPT.

Berbeda dengan di Hukum, di tiga fakultas lain represi yang dilakoni birokrat kampus langsung menimbulkan kegemparan. Ketenangan teman-teman di tiga fakultas tadi terusik, ketika sang PD III turun langsung. Inilah Security approach model birokrat UGM. Beberapa senator SMF mencoba memberikan perlawanan yang logis argumentatif. Tapi ancaman DO dihadapkan di KG menurut informasi seorang aktivisnya, PD III-nya sempat mengeluarkan ancaman,"Kalian adalah anggota keluarga UGM, dengan demikian harus mengikuti aturan-aturan di UGM, kalau tidak silahkan keluar!". Ironis sekali SK yang dikeluarkan oleh Rektor UGM dianggap sepenuhnya sebagai "Aturan-aturan di UGM". Memangnya Rektor yang memiliki UGM ?" Sinis seorang mahasiswa Sospol. Betapa retorika-retorika politik yang mengelabui rakyat dilingkup elit atas negara ternyata telah meruyak pula pada lingkup kecil dibawahnya.

PEMILU MAHASISWA FH UGM OTONOM ?

Di FH UGM Sk sakti yang dikeluarkan Rektor pada saat-saat awal belumlah berdampak krisis dan mengemparkan. Hal ini terlihat dari sikap PD III-nya sendiri yang tampak tenang-tenang saja. Beberapa aktivis FH UGM dan anggota- anggota lembaga mahasiswa yang berkenaan langsung denganpelaksanaan Pemilu berusaha mencari PD III dengan maksud mencari keterangan lebih lanjut mengenai dampak SK sakti Rektor bagi kesepakatan Pemilu di FH UGM. Menurut salah seorang aktivis hal ini perlu karena secara informal pihak dekan telah menyepakati Pemilu otonom sebagi konsekuensi ketegasan sikap terhadap kongres SMPT yang inskonstitusional. Jadi kita mau melihat konsistensi pihak dekanat juga, katanya.

Beberapa hari dicari PD III tidak berhasil diketemui. Lalu pada hari berikutnya, Selasa tanggal 18 mei 1995 PD III Hartono Hadisoeprapto, SH. Berhasil ditemui dan sempat terjadi dialog dengan beberapa aktivis dan ketua BEM periode lalu Hamka Jamaluddin. Pada intinya PD III menyatakan setuju Pemilu diundur (bukan 1 Mei) dengan alasan waktunya terlalu singkat setelah keluarnya SK Rektor dan waktunya berbarengan dengan Mid semester.

Tetapi beberapa hari kemudian segalanya berubah. Ini diawali dengan dipanggilnya ketua BEM, beberapa orang senator dan panitia pelaksana Pemilu FH UGM oleh Bu Dekan. Di kantor dekan terjadi dialog antara mereka dengan dekan mengenai Pemilu. Menurut Hamka, Dekan menekankan bahwa bagaimanapun caranya beliau menghendaki Pemilu dilaksanakan tanggal 1 Mei 1995. Apa yang terjadi pada tiga fakultas tadi akhirnya terjadi pula di FH UGM. Menurut sumber yang dipercayai, sikap Dekan FH UGM yang represif tersebut adalah imbas dari rapat umum yang diadakan Rektor. Dalam rapat umum tersebut Rektor UGM menekan Dekan dan PD III FH UGM supaya mengadakan Pemilu tanggal 1 Mei 1995. Entah bagaimana wujud tekanan Rektor pada Dekan FH, yang jelas sampai saat itu hanya FH yang masih tetap bertahan untuk tidak melaksanakan Pemilu pada tanggal 1 Mei 1995. Akhirnya konsistensi Dekanat terusik. Ini dibuktikan dengan keluarnya argumen-argumen yang tidak logis dan mengisyaratkan sekali kegugupan pihak dekan dalam menyikapi persoalan. Sampai-sampai Bu Dekan sempat berujar, "Pokoknya saya tidak mau tau tanggal 1 Mei harus

Dekan berkata, terserah....kalau perlu kalian mencalonkan diri lagi. Akan saya dukung! Memelas sekali, betapa murahnya harga diri, betapa mahalnya hak-hak politik mahasiswa saat ini.

ada Pemilu!" kata sumber tadi. Ketika Bu Dekan ditanyakan dalam waktu yang tersisa tidak cukup untuk membuat persiapan-persiapan, bagaimana sekiranya tidak ada calon yang mendaftar ?. Dekan berkata, terserah....kalau perlu kalian mencalonkan diri lagi. Akan saya dukung! Memelas sekali, betapa murahnya harga diri, betapa mahalnya hak-hak politik mahasiswa saat ini.

Akhirnya setelah melewati represivitas yang dilakukan birokrat kampus di FH pun Pemilu terpaksa diadakan tanggal 1 Mei 1995."Padahal BEM sendiri telah menetapkan Pemilu mahasiswa FH diadakan tanggal 29 Mei", kata Hamka.

Apakah dengan demikian Pemilu mahasiswa FH masih dapat dikatakan otonom ? "Mutlak otonom", kata Hamka. Demikian pula Yuliansyah ketua Pelaksana Pemilu FH. Katanya, "Bahwasanya ada hal-hal yang sama dengan SMPT itu wajar. Tapi yang penting aturan Pemilu pusat tidak kita pakai. Apakah benar ? Buktinya bukan tanggal saja yang sama dengan Pemilu pusat, tapi juga idiom-idiom yang dipakai SMPT juga dipakai di fakultas Hukum seperti PANLAKLIHFAK. "Seharusnya kita tak memakai istilah PANLAHLIKFAK karena itu merupakan kepanjangan tangan PANLAKLIHTAS SMPT, pakai saja istilah Panitia Pelaksana Pemilu Mahasiswa FH UGM", kata seorang aktivis. Tapi Jhonni Getamala (Senator SMFH) menegaskan bahwa otonomi yang dipertahankan FH adalah dari segi mekanisme. Seperti kampanye oral dan pemotongan suara satu pertiga bagi kandidat yang tidak ikut kampanye oral, katanya. Toh semuanya itu tak ada gunanya lagi diperdebatkan, Pemilu telah berakhir. Inkonsistensi sikap, rapuhnya semangat, dan segala ketakutan dan kegamangan semoga saja dapat kita jadikan pelajaran. Bahwa untuk kali nanti kita harus tegar, dan jangan lagi bersikap seperti Hakim Purwoto Ganda Subrata yang membatalkan kasasi kemenangan warga Kedung Ombo setelah ia dipanggil Presiden.**(P)**

KANDIDAT NGGAK MUTU *Sampai* ISU SOSIALIS

Program program yang diutarakan oleh kandidat terkesan hanya sebagai banyolan dan tidak serius" demikian lontaran seorang mahasiswa mengenai kampanye yang ditebarkan oleh para kandidiat dalam pemilu mahasiswa di Fakultas Hukum. Entah kenapa, lontaran seperti itu selalu terdengar dari tahu ke tahun baik yang disampaikan secara terang terangan maupun bisik bisik. Dan ternyata ada kandididat yang tak ambil pusing dengan semua itu dengan mengatakan bahwa kampanye baginya hanyalah formalitas belaka, jadi yang penting adalah kedekatan emosional.

Kampanye pemilu mahasiswa di Fakultas Hukum tahun ini memang tidak sesemarrak tahun kemarin ,disamping karena waktunya dianjukan secara mendadak juga dikarenakan mahasiswa fakultas Hukum sedang mengikuti ujian mid semester.(baca mahasiswa FH takut independen). Karena kondisi tersebut maka banyak kandidat yang tidak siap dalam mengutarakan program program. "Ada yang terkesan hanya main main" ujar Zaki mahasiswa angkatan 94. Belum lagi adanya komentar dari beberapa mahasiswa yang mengatakan kualitas para kandidat menurun dari tahun kemarin, dan terkesan memaksakan diri untuk naik padahal secara kualitas kurang.

Ungkapan ketidakpuasan,skeptis dan masa bodo telah merebak di kalangan mahasiswa terhadap pemilu . Salah satu penyebabnya adalah program program yang tak pernah terealisir. Program program seperti perbaikan tempat parkir, ruang kuliah, kualitas dosen sebenarnya sudah digembar gemborkan kandidat pemilu tahun lalu, tapi semuanya tidak pernah terealisir. "Ya bagaimana lagi, itu memang yang konkrit dan aktual" tutur seorang kandidat menjelaskan.

Dalam pemilu kali ini terhitung ada sepuluh kandidat untuk SM dan lima kandidat untuk BEM. Tapi ketika kampanye oral digelar tidak semua kandidat ikut yaitu dua kandidat SM dan seorang kandidat BEM, sehingga menurut peraturan yang disepakati jumlah suara mereka dikurangi sepertiga.

ISU-ISU DI SEKITAR PEMILU

Sementara panitia pemilu belum menunjukkan kesibukkanya dalam mempersiapkan acara, ada fenomena yang menarik sekaligus mengagetkan. Yaitu berhembusnya isu isu yang mendiskreditkan kandidat kandidat tertentu. Seorang kandidat ada yang diisukan berpaham sosialis atau kekiri kirian. Isu tentunya semakin merebak ketika menjelang pemilu. Tidak diketahui secara pasti siapa atau kelompok mana yang menghembuskan isu tersebut, tetapi ada yang mengatakan bahwa isu itu dihembuskan oleh pihak yang tidak menginginkan kandidat tertentu menang atau dipilih sehingga akan menguntungkan kandidat yang lain.

Banyak pihak menyesalkan adanya isu isu tersebut termasuk dikalangan kandidat sendiri. Rosalia Wahyuningsih salah seorang kandidat BEM mengatakan " sangat disesalkan timbulnya isu isu yang akhirnya merugikan suatu pihak bahkan person tertentu !". Tak bisa dipungkiri akhirnya isu isu tersebut menimbulkan sikap saling curiga yang tak beralasan. "Terkesan menampakkan kepengecutan, sebab banyak yang timbul tanpa nama" , ungkap Ali seorang mahasiswa angkatan 91. **(P)**

CIVIS PACEM PARA BELLUM

Ketika rencana pemilu mulai tersiar, masing masing pihak sibuk menyusun kekuatan. Kuda kuda pun disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga. Semuanya mengalir dengan cepat, mahasiswa dihadapkan pada pernghitungan suara dan suasana pun meredaf. Catatan khusus diberikan untuk pemilihan formatur BEM, karena perlu pemilihan lebih lanjut untuk memilih Ketua Umum BEM. Nasib para formatur pun ditentukan di sidang pleno yang berjalan dengan seru.

Perjalanan panjang itu tentunya diwarnai dengan pertarungan sengit dan agak kasar, tapi semuanya masih manusiawi dalam kehidupan ini. Ketidakwajaran terjadi ketika banyak mahasiswa yang terpesona oleh beberapa petualang politik yang menyebabkan dia tidak bisa berpikir rasional lagi. Ketika sang petualang yang menjadi patron terhempas dia merasa perlu ikut menghempaskan diri.Lebih celaka lagi ketika dia sudah mendengar dengan telinga sendiri bahwa sang patron menjadi *penyebar kebencian,* dia tetap setia sampai akhir. Kalau sang mahasiswa bisa berpikir rasional, sang patron harus didepak jauh jauh. Apakah dia metode baru untuk memasung kebebasan seseorang?

Salah satu etika yang tidak disadari oleh para aktor di fakultas hukum adalah lawan politik harus dibedakan dengan musuh politik. Perbedaan visi politik dalam sebuah pertarungan hendaknya tidak menyebabkan permusuhan dalam hubungan pribadi, tetapi apa hasil di kampus Fakultas Hukum. Visi politik yang berbeda dilanjutkan dengan permusuhan diluar arena. Celaka lagi ketika pihak yang kalah merasa perlu membuat kultur oposisi yang vulgar dengan ancaman ala"mafia" untuk menghimbau semua "pengikutnya" memboikot sang pemenang.

Pepatah Yunani mengatakan ***civis pacem para belllum,*** yang punya kekuatan besar yang menentukan semuanya. Selanjutnya konsep ini secara sempit diartikan menang dan kalah. Di abad modern ini, pepatah itu sudah harus dibuang jauh jauh, karena dengan demikian tidak akan ada tempat bagi pihak yang kecil dan lemah. Inilah yang seharusnya disadari oleh orang orang yang mengaku "pemain" di fakultas Hukum. Jangan hanya karena kekalahan, perjuangan ke arah perbaikan fakultas jadi tertunda.**(P)**

Petisi

MANAJEMEN FH UGM AMBURADUL

Mengkaji kembali sistem besar yang ada di Fakultas Hukum UGM pada saat ini, akan ditemukan beberapa hal menarik. kini kita sudah dihadapkan pada sistem manajemen yang vulgar dan jalan di tempat. Pola perencanaan dan pengambilan kebijakan serta pemanfaatan dana di Fakultas telah terperangkap dalam pola yang "berbahaya"

Suatu permulaan yang memberi harapan ketika sang Dekan memberi kebebasan kepada masing masing kabag untuk membuat kebijaksanaan baru, tetapi tidak jelas dimana posisi Dekan dalam kasus ini. Apakah masing masing Kabag dan Kasubag diberi otonomi penuh atau masih dengan kontrol sang Dekan. " Yang penting tidak pernah ada rekayasa dan "bumbu" dari dekan untuk mengutak-ngatik hasil rapat kabag dan kasubag" demikian tutur Suradi Kabag Tata Usaha. Pola yang masih kabur ini diperparah dengan rasa percaya diri yang berlebihan dari birokrat fakultas. Dari penuturan Suradi bisa diketahui bahwa selama kebijakan kebijakan yang ada telah berjalan dengan baik tidak perlu

dibuat kebijakan baru. Selanjutnya Suradi menuturkan bahwa dia sudah senang untuk bertahan dengan sistem yang telah mapan seperti sekarang dan kebijakan baru, diperlukan apabila sudah terjadi penyimpangan. Terlihat bahwa Fakultas Hukum tidak pernah menghiraukan dirinya dalam konjungtur dunia universitas yang dinamis. Ada pola represif yang dipakai disini, bahwa kebijakan baru hanya diperlukan apabila telah terjadi penyimpangan dan timbul kerugian. Banyaknya kebijakan kebijakan di Fakultas Hukum bisa diukur dari penyimpangan penyimpangan dan masalah yang mereka hadapi.

Demikianlah bagi Fakultas Hukum UGM, sistem manajemen mereka berbasis pada tradisi yang terus diawetkan. Sampai pada keterlebitan mahasiswa dalam pengambilan keputusan, prinsipnya sama bahwa selama tidak ada penyimpangan mahasiswa tidak perlu memberi masukan atau terlibat dalam pengambilan keputusan. "Sebaiknya mahasiswa hanya mengurus studinya saja' tandas Suradi.

Berlanjut pada pengelolaan kekuangan, Fakultas Hukum semakin menunjukkan sistemnya yang vulgar. Pembantu Dekan II Sihono Tjokroredjoso menegaskan bahwa penentuan pengeluaran Fakultas sepenuhnya berada di tangan Dekan, kendati masing masing bagian diperkenankan melakukan pembahasan awal. Lebih lanjut Sihono menyatakan bahwa tidak pernah ada secara khusus pembagian dana untuk masing masing bidang. Secara implisit disini berarti tidak ada anggaran tetap dan masing masing bidang bisa melakukan pengeluaran sebanyak kebutuhan mereka yang muncul di lapangan. Tidak ada batas minimum anggaran untuk masing masing bidang.

Sumber dana pembangunan fakultas sendiri berasal dari DPP-SPP, keanehan muncul ketika Sihono selaku PD II tidak tahu menahu sumber dana lain. "Semuanya kembali ke tangan Bu Dekan" tutur Sihono. Informasi lain dari Sihono adalah yayasan alumni tidak pernah memberikan kontribusi yang berarti kepada fakultas, alasannya yayasan alumni tidak pernah digarap dengan serius dan kondisi lulusan Fakultas Hukum sangat heterogen.

Bukti kevulgaran manajemen fakultas adalah prioritas pengeluaran dana yang masih lemah. Seluruh civitas akademika perlu tahu bahwa telah dikeluarkan dana besar untuk proyek dadakan pengindahan fakultas. Telah banyak biaya yang dihabiskan hanya demi kepentingan lomba taman nasional, tanpa memperhatikan pos-pos lain yang sebenarnya sedang membutuhkan dana.

Fakultas Hukum telah mentakdirkan dirinya untuk terjebak dalam sistem yang amburadul. Fakultas hanya berdiam diri ketika dia sangat tergantung pada master plan universitras. Begitu banyak rencana yang harus batal karena tidak sesuai dengan kebijakan universitas, bukti bahwa fakultas kehilangan bargaining dengan Universitas. Semisal fakultas ingin membangun fasilitas garasi, tetapi daerah pembangunan diproyeksikan sebagai daerah pemekaran jalan oleh universitas, akibadnya fakultas harus mengalah. Di sisi lain terlihat bahwa tidak ada koordinasi yang terpadu antara Universitas dan Fakultas.

Demikianlah cerita sedih Fakultas Hukum yang belum menyadari dirinya hidup dalam jaman yang gelap bak katak dalam tempurung.**(P)**

dari Taman Bu Dekan ke Dana OPF

Mungkin aneh kelihatannya ketika penghuni kampus melihat Fakultas Hukum sibuk bersih-bersih sampai membuat papan nama yang keren. Jangan heran ! Fakultas Hukum sedang mempersiapkan diri ikut Lomba Taman Nasional dengan kategori "Taman Hijau Terbuka". Hampir tak terduga bahwa fakultas mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra habis habisan untuk keikutsertaannya dalam lomba Taman Nasional. Masih ingatkan para birokrat fakultas bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dibanding dengan keindahan taman. Nama besar FAkultas Hukum tidak hidup hanya karena tamannya yang rapi dan indah, tapi dari insan-insan yang berkualitas.

Sungguh aneh, usaha dan dana yang ekstra habis habisan itu kelihatannya digarap dengan setengah setengah. Terlihat bahwa yang menggarap proyek itu hanyalah para pegawai pegawai fakultas, mengapa tidak sekalian birokrat fakultas mengundang ahli pertamanan untuk melakukan pembenahan. Dana sudah keluar banyak tapi usaha masing setengah setengah , mungkinkah itu akan mencapai hasil yang maksimal ?

Kelihatannya dalam upaya membawa fakultas Hukum ikut program "tinggal landas", pengelola fakultas sering melakukan gebrakan. Tidak berhenti di program taman dadakan, rupanya banyak dana dana untuk pos-pos tertentu yang terpaksa dipinjamkan ke pos lain , semisal dana untuk karcis parkir yang raib entah ke mana, akibadnya mahasiswa harus memarkir kendaraanya dengan anarkis.

Bukan suatu kebetulan ketika dana yang dialokasikan kepada mahasiswa ikut raib hanya karena kebijakan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Kru Pleeidoi berhasil menemui sumber yang bisa dipercaya, dalam penuturannya diketahui bahwa untuk mahasiswa dianggarkan dana OPF sebesar Rp. 150.000 per orang, berarti ada kenaikan sebesar Rp.50.000 dari dana OPF tahun ajaran lalu. Tetapi kepada mahasiswa tetap diberikan Rp. 100.000 dari Rp.150.0000 yang seharusnya diterima. Rinciannya Rp. 50.000 untuk dosen pembimbing skripsi dan Rp. 100.000 untuk mahasiswa untuk selanjutnya dipotong pajak sekitar 5% Mulailah kru Pleeidoi berburu informasi, menurut seorang mahasiswi Fakultas Hukum UGM yang sedang skripsi, benar bahwa baru-baru ini dia hanya menerima dana OPF sebesar Rp. 100.000. Ketika mahasiswa Fakultas lain dihubungi, dibenarkan bahwa di Fakultasnya dana OPF yang diterima mahasiswa sebesar Rp. 150.000.

Tak syak lagi, ada yang tidak beres dengan Fakultas Hukum. Tentunya para birokrat fakultas telah membentengi diri untuk menghadapi segala kritikan dan gelombang tuntutan dari mahasiswa. Biarkanlah mereka sibuk dengan segala apologi mereka, yang penting sebagai mahasiswa yang sadar akan hak politiknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. **(P)**

FACT FINDING... PENTING!

Sidang pleno Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM periode 1995/1996 yang diadakan pada tanggal 19-21 Mei 1995 di Fakultas Hukum UGM telah berhasil diselesaikan meskipun diselimuti oleh perdebatan perdebatan sengit dan panjang dari para peserta maupun peninjau. Selain telah berhasil menetapkan beberapa ketetapan, sidang pleno itu juga telah menelorkan suatu rekomendasi penting. Rekomendasi yang digodok di komisi C itu menugaskan Majelis Tinggi SM FH UGM agar membentuk team khusus pencari fakta tentang keabsahan konggres IV SM UGM. Dengan dibantu team ahli hukum dalam pencarian fakta, diharapkan paling lambat tiga bulan team itu sudah merampungkan tugasnya.Bantuan team ahli hukum sangat diperlukan terutama dalam menentukan keabsahan MoU yang menjadi dasar pelaksanaan konggres IV SMPT. Selanjutnya advis dari mereka diperlukan juga untuk menentukan implikasi dari keabsahan pelaksanaan Konggres.

Munculnya rekomendasi tersebut merupakan tampungan dari dua keinginan kelompok tentang pernyataan sikap Majelis REndah SM FH UGM periode 1994/1995 terhadap hasil konggres IV. Kelompok yang satu berusaha menguji keabsahan pernyataan sikap tersebut, namun gagal setelah tidak dapat membuktikan peraturan mana yang telah dilanggar oleh Majelis Rendah SM FH UGM periode 1994/1995 .Argumen argumen konyol sempat beredar dari kelompok kontra pernyataan sikap. Bak priyayi yang turun gunung mereka mengatakan bahwa Majelis Rendah tidak berhak memberikian penilaian atas hasil Konggres karena mereka tidak semuanya ikut Konggres IV. Seakan dia lupa bahwa seorang hakimpun tidak pernah terlibat sebuah peristiwa tapi dia bisa memutuskan benar tidaknya suatu perkara.Kelompok lain yang pro pernyataan sikap itu menuntut agar hasil pernyataan sikap itu dituangkan dalam bentuk keputusan yang lebih tinggi dan penegasan implikasi dari pernyataan sikap yang diambil.

Tugas yang diemban oleh team khusus pencari fakta merupakan tugas yang penting. Mengingat hasil temuan team akan menentukan hubungan lebih lanjutantara mahasiswa Fakultas Hukum dengan SMPT UGM.Di sisi lain rekomendasi ini membawa aspirasi mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang ingin segera memperoleh kejelasan dan penegasan dari kemelut Konggres IV. Arti penting lain timbul karena gaung pernyataan sikap Majelis Rendah periode lalu telah tersebar dimana mana. Segitiga arti penting ini hendaknya diperhatikan oleh team khusus pencari fakta agar dalam melaksanakan tugasnya mereka bisa independen dan bertindak tegas.

Komisi C juga merekomendasikan bila perlu, hasil temuan team dibawa ke Senat Universitas Gadjah Mada. Karena hasil temuan ini tidak dibawa ke Konggres V, mengingat untuk sementara waktu selama belum ada hasil definitif, maka konggres IV dan segala produknya belum bisa dijadikan sarana pembahasan apapun.Termasuk Konggres V yang lahir dari rahim pemilu SMPT 95. Pemilu itu sendiri Disisi lain pesendiri anak haram BEM UGM periode 94/95 sebagai salah satu produk Konggres IV. Di sisi lain kalau dikatakan bahwa selama tidak tunduk pada Konggres IV, masih ada Konggres III, tetapi satu hal yang dilupakan bahwa pengurus SMPT versi Konggres III tyang dikomandoi oleh Elan Satriawan telah dibubarkan. Maka paling tepat hasil temuan dibawa ke Senat Universita Gadjah Mada sebagai badan pemegang kedaulatan tertinggi di UGM.

Pertanyaan berikut yang muncul adalah bisakah kita berharap pada hasil temuan yang dibawa ke Senat Universitas ? Apapun hasilnya akan kembali kepada peran dan fungsi Senat Universitas. Senat Universitas sendiri saat ini posisinya masih jauh untuk dikatakan independen, mengingat sang Rektor yang "maha kuasa" juga duduk sebagai Ketua Senat.Padahal fakta di lapangan mencatat bahwa Pak Rektor mengambil sikap pro SMPT tanpa mempermasalahkan keabsahan pelaksanaan Konggres IV.

Tolong dicermati ! Ketika kelompok kontra pernyataan sikap hendak memvonis senator majelis rendah periode lalu, muncul pertanyaan sudahkah para senator dilakukan fact finding dalam menilai keabsahan Konggre IV. Seharusnya rektorpun bercermin, sudahkah dia melakukan fact finding ketika melantik pengurus SMPT versi Konggres IV sementara ada ribut ribut saat Konggres.

Fakta fakta ini hendaknya membuat kita selalu mawas diri bahwa apapun hasil temuan team khusus nati, perjuangan belum selesai.**(P)**

TIN ISMAHI '95 ELITIS ?

Di tengah kesibukan kegiatan perkuliahan yang cukup padat terutama menjelang Mid Term waktu itu, Bem FH UGM dengan bantuan beberapa orang mahasiswa yang bersedia bekerja, menyempatkan diri untuk menyelenggarakan temu ilmiah Nasional ISMAHI 1995 yang bertema "IMPLIKASI LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL" yang berlangsung pada tanggal 11-13 April 1995 di UC UGM dalam sambutan tertulisnya Bagus Sukma Jati, Sekjen ISMAHI, mengatakan tema acara ini sengaja dipilih mengingat adanya tantangan yang teramat besar untuk diantisipasi sehubungan dengan adanya penyimpangan dari inkonsistensi penegakan hukum Indonesia, juga antisipasi terhadap kesepakatan GATT, APEC dan AFTA.

Dilihat dari tema yang ada acara ini memang perlu diadakan karena sangat menunjang studi kita sebagai mahasiswa hukum. Namun kenyataannya dengan kontribusi peserta yang cukup besar untuk kantong mahasiswa di DIY khususnya mengakibatkan acara ini hanya dapat diikuti oleh segelintir mahasiswa berduit saja. Hal ini yang akhirnya membuat sebagian orang berpendapat bahwa acara semacam ini kurang efektif untuk diselenggarakan karena manfaatnya hanya dirasakan oleh segolongan mahasiswa saja.

Bagaimanapun Seminar, Diskusi, Temu Ilmiah atau apapun namanya perlu untuk diadakan. Tapi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa maka lebih mengena apabila acara tersebut digelar secara sederhana saja dengan tetap menghadiri pembicara yang berkualitas yang sadar bahwa kepentingan ilmiah harus dipisahkan dari kepentingan "bisnis. Dan lebih penting lagi acara semacam itu jangan sampai lepas dari visi kerakyatan dan konsep pendidikan murah yang masih harus dan terus kita perjuangkan. **(P)**

TERPILIHNYA KETUA UMUM BEM FH UGM

Sebuah kegiatan yang demokratis telah berlansung yakni pemilihan ketuaa umum BEM FH UGM melalui sidang pleno SM FH UGM. Sidang yang dijadwalkan hanya berjalan dua hari saja, tepatnya pada tanggal 20 - 21 Mei 1995 ternyata masih harus ditambah satu hari. Penambahan itu untuk sebuah harga kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat.

Sejak hari pertama pada tahaf pembahasan tata tertib suasana sidang langsung hangat dengan perdebatan-perdebatan. Permaian kata-kata yang argumentatif diandalkan. setelah tatib tadi disepakati menyusul pembahasan-pembahasan ketetapan-ketetapan lain seperti GBHK, mekanisme dan susunan lembaga kemahasiswaan dan rekomendasi yang masing-masing dibahas dalam sidang komisi.

Pada hari ketiga puncak agenda sidang sampai pada pemilihan ketua umum BEM. Dua orang formatur : Linda Ayu Citra Ningsih dan Sahbella Hasibuan (formatur ketiga tidak hadir) mulai perang visi dan misi yang kemudian ditanggapi oleh peserta.

Dari debat kedua kandidat ketua umum itu peserta yang terdiri dari wakil angkatan dan majelis rendah memberikan suaranya. Pada pemilihan pertama masing-masing kandidat mendapat 6 suara. Dilanjutkan pada pemilihan kedua dengan suara yang tetap. Kemudian berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan melalui sistem one man one vote akhirnya muncul ketua BEM terpilih Sahbella Hasibuan dengan suara 18 : 14. **(P)**

In absentia

Pak Suradi mengatakan," kalau tidak ada penyimpangan, tak perlu ada perubahan.

Idiiih.....mapan banget, makanya Pleeidoi hadir untuk mendobrak mitos kemapanan

Taman Fakultas jadi cantik karena ada Lomba Taman Nasional

Kapan ya... ada lomba parkiran nasional, lomba ruang kuliah nasional, lomba perpustakaan nasional supaya semuanya ikut cantik

Sandy, Ketua Umum SM UGM dalam kampanyenya pada Pemilu lalu mengatakan,"Perubahan sekarang juga!"

Rasanya, kandidat-kandidat tahun yang lalu juga ngomong gitu

Le' Doi

Pleeidoi
MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN
Diterbitkan oleh : BPPM FH UGM
MAHKAMAH
EDITOR EDISI INI :
Jo2hn, Amenx, Arch, Dodo, Gondez